

Modernisasi Pendidikan Pesantren (Studi Analisis di Pondok Pesantren Nurul Haramain NW Narmada)

Muh. Asroruddin al Jumhuri

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Amin Gersik, Kediri, Lombok Barat
asror.fakod@gmail.com

ABSTRAK

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua dan asli Indonesia telah menyajikan sebuah sistem pendidikan yang tradisional. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, sebagian besar pesantren mengadakan berbagai perbaikan dan pembenahan sebagai upaya modernisasi pendidikan yang diselenggarakannya. Modernisasi pendidikan pesantren, diyakini sebagai suatu upaya pesantren untuk tetap bertahan dan eksis di tengah persaingannya dengan lembaga pendidikan modern yang menawarkan sistem pendidikan sekuler melalui sistem pendidikan sekolah. Modernisasi pesantren dilakukan sebagai respon terhadap penjajah Belanda yang memperkenalkan sistem pendidikan modern. Modernisasi pesantren dilakukan dengan mengembangkan kurikulum pesantren dengan memasukkan mata pelajaran umum, yang selanjutnya berimplikasi terhadap diversifikasi lembaga pendidikan pesantren, sistem penjenjangan, kepemimpinan dan manajemen pendidikan pesantren.

Nurul Haramain NW Narmada sebagai salah satu lembaga pesantren sejak lahirnya pada tahun 1991 silam, telah mencoba menerapkan sistem pendidikan pesantren modern sebagai tawaran pilihan tambahan bagi masyarakat dalam memberikan pendidikan bagi putra putri mereka selain lembaga-lembaga pesantren yang menggunakan sistem tradisional.

Kata kunci: modernisasi pendidikan, pendidikan pesantren

A. Pendahuluan

Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional yang lahir dan tumbuh berbarengan dengan datangnya Islam ke tanah Jawa. Dengan demikian, pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua dan asli di masyarakat Indonesia.¹

Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua, pesantren ditengarai oleh beberapa ahli, sebagai kelanjutan dari sistem pendidikan pada masa Hindu-Budha pra-Islam. Terdapat beberapa kesamaan antara pesantren dengan sistem pendidikan sebelumnya seperti: letaknya yang biasanya terdapat di pedesaan, didirikan dan dipimpin oleh tokoh agama, pola dan materi pembelajarannya yang mengarah kepada *asketisme*, kesederhanaan dan kemandirian.

¹ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 57.

Sebagai sebuah sistem pendidikan yang merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan sebelumnya, pesantren berhasil memadukan sistem pendidikan Islam yang di dalamnya diajarkan ajaran Islam dengan budaya lokal yang mengakar pada saat itu. Upaya pemaduan antara ajaran Islam dengan budaya lokal itu, merupakan ciri penyebaran Islam pada masa awal Islam, yang mengutamakan kelenturan dan toleransi terhadap keyakinan dan nilai-nilai yang hidup subur di masyarakat sejak sebelum Islam datang ke Nusantara.

Dengan demikian, dalam sejarah perjalanannya, pesantren telah berhasil melakukan upaya-upaya kontekstualisasi ajaran Islam dengan budaya lokal. Kalangan pesantren pada masa awal Islam, telah dapat menampilkan sekaligus mengajarkan Islam yang dapat bersentuhan mesra dengan nilai-nilai, keyakinan, dan ritual sebelum Islam datang.

Jadi jelaslah bahwa pesantren yang merupakan lembaga pendidikan di Indonesia, yang tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun lalu, masih eksis dan dibutuhkan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia. Namun, eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia, mendapat berbagai tantangan dan rintangan. Mulai pada masa kolonial Belanda, masa kemerdekaan, masa Orde Baru hingga masa sekarang. Pesantren mendapat tekanan yang tidak ringan; seperti marginalisasi peran pesantren, penciptaan stigma jelek, perluasan pendidikan sekuler bahkan memvonis bahwa pesantren adalah sarang dan pencetak teroris.

Tantangan pertama datang dari sistem pendidikan yang dilancarkan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang memperkenalkan sistem pendidikan sekolah bagi anak-anak di Indonesia, dengan mendirikan Sekolah Rakyat (*volkscholen*) atau disebut juga sekolah desa (*nagari*) dengan masa belajar 3 tahun.

Selain dari sistem pendidikan Belanda, pendidikan pesantren datang dari *eksponen* tokoh sekuler pendidikan Indonesia yang memberikan stigma jelek terhadap pesantren, dan menginginkan agar pesantren dihapuskan sebagai bagian dari pendidikan Nasional.²

² Pendapat negatif terhadap pendidikan pesantren misalnya datang dari Sutan Takdir Alisyahbana – sebagai eksponen pendidikan Belanda—yang menyatakan bahwa ahwa sisem pendidikan pesantren harus ditinggalkan atau setidaknya ditransformasikan sehingga dapat memerikan kemajuan secara intelektual kepada kaum Muslim. Jika pesantren tidak di hapus—menurut Sutan Takdir—maka akan membiarkan ummat Islam dalam keterbelakangan dan kebekuan berpikir. Lihat Azyumardi Azra,

Tantangan yang lebih memberikan rangsangan bagi pesantren adalah datang dari kaum reformis Muslim, yang sejak awal abad ke-20 meyakini bahwa untuk menjawab tantangan pemerintah kolonial Belanda, adalah dengan cara mengadakan perubahan-perubahan dalam pendidikan Islam. Dalam konteks ini, muncul gerakan pembaharuan pendidikan Islam dengan dua bentuk, yaitu; *pertama*, memberikan muatan-muatan pendidikan Islam pada sekolah-sekolah umum. *Kedua*, mendirikan madrasah-madrasah modern yang mengadopsi secara terbatas sistem sekolah modern.

Respon pendidikan pesantren terhadap sekolah dan madrasah yang didirikan oleh kaum reformis Islam, adalah “menolak sambil mencontoh”. Di satu sisi, pesantren menolak asumsi-asumsi kaum reformis dan memandangnya sebagai ancaman yang serius terhadap pesantren, namun juga dalam batas-batas tertentu mengikuti dan mencontoh langkah kaum reformis, agar dapat bertahan hidup.

Karena itulah, pesantren melakukan langkah-langkah penyesuaian yang mereka yakini akan memberikan manfaat bagi kaum santri, dan mendukung keberlangsungan dan keberlangsungan pesantren, seperti sistem penjenjangan (klasikal) dan kurikulum yang terencana, jelas dan teratur.³

Tantangan terhadap pendidikan pesantren kembali terjadi pada masa setelah kemerdekaan, yang justru terasa lebih berat. Pada masa itu tantangan muncul dengan terjadinya ekspansi pendidikan modern dan madrasah modern, sehingga terdapat banyak pilihan pendidikan bagi anak-anak Muslim, yaitu sekolah-sekolah umum, madrasah-madrasah modern, sekolah-sekolah Islam yang didirikan oleh organisasi-organisasi umum, dan tentunya pesantren dengan madrasah di dalamnya.

Respon pesantren berhadapan dengan modernisasi pendidikan, lebih banyak berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan transformasi kelembagaan pesantren menjadi lembaga pendidikan modern, tapi cenderung memperhatikan kebijaksanaan hati-hati (*cautious policy*), yaitu mereka menerima

“Pesantren; Kontinuitas dan Perubahan” dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina 1997), hlm. Xiii.

³ Karel A Steenbrink, *Pesantren, Madrasah Sekolah: Pendidikan dalam Kurun Waktu Modern* (Jakarta: LP3ES, Cet. II 21994), hlm. 65-67.

pembaharuan (modernisasi), tetapi hanya dalam skala yang sangat terbatas, sebatas mampu menjamin pesanten dapat bertahan.

B. Modernisasi Pendidikan Islam

Pada masa sekarang, umat menghadapi tantangan yang berat dari pihak luar yang berimplikasi terhadap masa depan kehidupan beragamanya. Tantangan itu mulai dari kolonialisme dan imperialisme yang menghasilkan benturan keras antara kebudayaan Barat dengan ajaran Islam, sampai kepada materialisme, kapitalisme, industrialisme yang telah berhasil mengubah sistem berpikir dan struktur sosial.

Sebagai respon dari tantangan di atas, para pemikir dan intelektual muslim melancarkan berbagai upaya modernisasi yang muncul dalam berbagai ragam dan karakteristiknya. Hal ini sesuai dengan setting *sosio historis* yang melingkupi para modernis.

Modernisasi pendidikan Islam, merupakan salah satu pendekatan untuk penyelesaian jangka panjang atas berbagai persoalan umat Islam saat ini dan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, modernisasi pendidikan adalah suatu yang penting dalam melahirkan peradaban Islam yang modern.⁴ Namun demikian, modernisasi pendidikan Islam tidaklah dapat dirasakan hasilnya pada satu dua hari saja, tetapi ia memerlukan suatu proses panjang yang setidaknya akan menghabiskan sekitar dua generasi.⁵ Sebagai suatu proses yang panjang, modernisasi pendidikan Islam membutuhkan suatu kerangka konseptual yang jelas dan pasti, sehingga dapat mengarahkan proses pendidikan Islam yang diselenggarakan.

Terdapat dua alasan pokok yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan modernisasi pendidikan Islam, yaitu, *pertama*, konsep dan praktik pendidikan Islam selama ini terlalu sempit, terlalu menekankan pada kepentingan akhirat, yang melahirkan dikotomi keilmuan yang telah diwariskan umat Islam sejak masa kemunduran Islam (abad kedua belas). Dikotomi keilmuan dalam pendidikan Islam meliputi: 1) dikotomi antara ilmu agama dan ilmu non agama, yang melanggengkan supremasi ilmu-ilmu agama yang berjalan secara menoton,

⁴ Syed Sajjad Husein dan Syed Alio Ashraf, *Menyongsong Keruntuban Pendidikan Islam*, terj. Rahamani Astuti (Bandung: Gema risalah Press, 1994), hlm. 6.

⁵ Fazlur Rahman, *Islam*, Ter. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 54.

2) dikotomi antara wahyu dan alam yang menyebabkan kemiskinan penelitian empiris dalam pendidikan Islam, dan ketiga, 3) dikotomi antara iman dan akal. Dalam perspektif ini, Islam harus diyakini sebagai *religion of nature*, yang dengannya segala bentuk dikotomi antara agama dengan ilmu pengetahuan dihilangkan. Alam beserta isinya (materi dan kejadiannya) mengandung tanda-tanda yang memperlihatkan pesan-pesan Tuhan yang menggambarkan kehadiran kesatuan sistem global, yang dengan mendalaminya, seseorang akan mampu menangkap makna dan kebijaksanaan dari suatu yang transenden. Dengan demikian, iman tidak boleh dipertentangkan dengan ilmu pengetahuan.⁶

Kedua, lembaga-lembaga pendidikan Islam sampai saat ini, belum atau kurang mampu memenuhi kebutuhan umat Islam, dalam menghadapi tantangan dunia modern dan tantangan masyarakat dan bangsa Indonesia di segala bidang. Oleh karena itu, untuk menghadapi dan menuju masyarakat madani diperlukan konsep pendidikan Islam serta peran sertanya secara mendasar dalam memberdayakan umat Islam. Dalam perspektif ini, lembaga pendidikan Islam diharapkan sanggup membenahi diri, sehingga ia tidak hanya mampu menjadi media transmisi budaya, ilmu dan keahlian, tapi juga sebagai interaksi potensi dan budaya, yaitu bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Islam mampu menumbuh-kembangkan potensi anak yang diberikan Allah sejak lahir dalam konteks mempersiapkan anak didik untuk menjalani kehidupannya.⁷

Berdasarkan dua alasan utama di atas, modernisasi pendidikan Islam harus didasarkan pada konsep dasar, filsafat dan teori pendidikan yang mantap, melalui perumusan asumsi-asumsi dasar yang kokoh dan jelas tentang manusia, yaitu hakekat kejadiannya, potensi-potensi bawaannya, tujuan hidup dan misinya di dunia ini baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Dengan demikian, modernisasi pendidikan Islam, sebagai langkah awal, harus melalui perumusan konsep dasar filsafat pendidikan Islam yang mengembangkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pelaksanaannya dalam konteks lingkungan (*sosio-kultural*) masyarakat Islam, sehingga modernisasi

⁶ Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Pendidikan Islam Non Dikotomik, Humanisme Religius Sebagai Paradima Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Gema Media, 2002), hlm. 45.

⁷ Langgulung, *Pendidikan Islam*, hlm. 95.

pendidikan Islam akan mempunyai landasan yang kokoh yang dengannya arah, maksud dan tujuannya jelas dan pasti.

Pentingnya konsep dasar filosofis pendidikan Islam ditegaskan oleh Muhaimin dengan menganalogikan pendidikan Islam sebagai sebuah bangunan rumah. Dalam pandangannya, filsafat pendidikan Islam itu mencakup tiga dimensi yaitu: 1) dimensi bahan-bahan dasar yang menentukan kekuatan suatu pondasi bangunan. Dalam konteks ini, filsafat pendidikan Islam dapat diartikan sebagai sumber-sumber, hasil pemikiran dari para pemikir pendidikan Islam, 2) dimensi fondasi bangunan itu sendiri yang berupa dasar-dasar, prinsip-prinsip dan azas-azas yang menjadi landasan berpikir dalam menjawab berbagai persoalan pokok dalam sistem pendidikan Islam, dan 3) dimensi tiang penyanggah yang berupa struktur ide-ide dasar dan pemikiran-pemikiran fundamental sebagai hasil rumusan dari para pemikir pendidikan Islam dalam melandasi, mengembangkan, mengarahkan dan memperkokoh bangunan sistem bangunan pendidikan Islam.⁸ Dengan dasar filosofis di atas, dapatlah diformat modernisasi pendidikan Islam yang antisipatif terhadap kebutuhan dan perubahan zaman, dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 1) merumuskan kembali konsep pendidikan Islam yang didasarkan pada asumsi dasar tentang manusia dengan memberdayakan potensi-potensi peserta didik sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, 2) mengintegrasikan ilmu-ilmu *naqliyah* dan ilmu-ilmu *'aqliyah*, agar terhindar dikotomi antara ilmu-ilmu yang disebut ilmu agama dan ilmu umum, 3) menformat pendidikan Islam yang mengarah kepada tercapainya sikap dan perilaku toleransi, lapang dada dalam menghadapi perbedaan pendapat dan penafsiran ajaran Islam, tanpa melepaskan pendapat atau prinsip yang diyakini, 4) menumbuhkan jiwa mandiri sehingga menghasilkan etos kerja yang tinggi, 5) menyiapkan generasi Islam yang mampu menjawab tantangan dan perubahan masyarakat.

Dalam konteks di atas, Nurcholis Madjid memaparkan bahwa dalam modernisasi pendidikan Islam, haruslah diciptakan suatu sistem pendidikan Islam yang memiliki keterpaduan antara unsur keislaman, keindonesiaan dan keilmuan menuju tercapainya masyarakat madani. Unsur keislaman menghadirkan konsep hubungan organik antara iman dan ilmu, yang telah dibuktikan oleh

⁸ Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 32.

umat Islam dalam sejarah Islam, ketika umat Islam memiliki jiwa kosmopolit yang sejati. Berdasarkan kosmopolitanisme tersebut, umat Islam telah berhasil membangun peradaban dalam arti yang sebenarnya yang berdimensi universal.⁹

Keberhasilan umat Islam dalam mencapai kemajuan dan kegemilangan memperkokoh nilai-nilai universalitas Islam yang meliputi unsur sejarah, filsafat, teologi dan tasawuf, yang merupakan tradisi keilmuan Islam masa klasik. Penguasaan terhadap warisan keilmuan Islam klasik, merupakan suatu keharusan dalam memajukan pendidikan Islam dengan dibarengi penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, kerana dengan demikian tidak akan terjadi kemiskinan intelektual yang dalam istilah Nurcholish Madjid disebut “kehilangan jejak riwayat intelektual Islam”.¹⁰

Dalam unsur ke-Indonesian, Nurcholis Madjid menekankan adanya upaya untuk menciptakan suatu lembaga pendidikan yang mempunyai identitas kultural yang sejati, sebagai konsep baru pendidikan bangsa Indonesia, yang di dalamnya juga dipertahankan nilai-nilai universalitas Islam, yang mampu melahirkan *prototipe* peradaban masyarakat Muslim Indonesia masa depan. Konsep inilah yang relevan dengan konsep pendidikan Islam untuk menciptakan masyarakat madani. Dalam konteks ini, sangat penting diupayakan modernisasi pendidikan Islam dengan berlandaskan *platform* kemoderenan yang berakar dalam ke-Indonesiaan dengan dilandasi keimanan.

Sedangkan unsur keilmuan, ditekankan agar modernisasi pendidikan Islam dapat menghilangkan dikotomi ilmu yang terjadi di masyarakat Muslim kontemporer, yang mengakibatkan terpisahnya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang memiliki orientasi berbeda, yaitu lembaga pendidikan yang berorientasi kepada ilmu-ilmu modern, dan yang tetap mempertahankan kajian ilmu-ilmu keislaman klasik.¹¹

⁹ Nurcholish Madjid, *Islam: Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 22.

¹⁰ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 21.

¹¹ Yasmadi, *Modernisasi*, hlm. 138.

C. Modernisasi Pendidikan Pesantren

Sebagai lembaga pendidikan tertua dan asli masyarakat Indonesia, pesantren menampilkan suatu sistem pendidikan tradisional, yang mempertahankan sistem, materi, metode, evaluasi tradisional dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran Islam.

Sistem pendidikan dengan tidak mengenal penjenjangan, menggunakan metode *sorogan* dan *wetonan*, materi pembelajaran dengan menggunakan kitab-kitab ilmu keislaman klasik, telah berlangsung ratusan tahun sejak muncul dan berkembangnya pesantren di Indonesia. Namun demikian, sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman, sebagian besar pesantren mengadakan berbagai perbaikan dan pembenahan sebagai upaya modernisasi pendidikan yang diselenggarakannya.

Modernisasi pendidikan pesantren, diyakini sebagai suatu upaya pesantren untuk tetap bertahan dan eksis di tengah pergumulannya dengan lembaga-lembaga pendidikan modern yang menawarkan sistem pendidikan sekuler melalui sistem pendidikan sekolah, yang sengaja didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda

Modernisasi sistem pendidikan pesantren, dimulai pada masa penjajahan Belanda, yaitu ketika Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan sekolah, untuk memperluas kesempatan kepada pribumi, guna mengenyam pendidikan modern. Untuk maksud itu, pemerintah Belanda membuka *volkschoolen* (Sekolah Rakyat), atau juga dikenal dengan Sekolah Desa (nagari) pada dasawarsa 1870-an, dengan masa belajar selama 3 tahun dengan siswa sekitar 16.606 orang. Pada tahun 1871, tercatat sekitar 263 sekolah dasar sejenis itu dan menjelang 1892 meningkat menjadi 515 sekolah tersebut dengan jumlah siswa sekitar 52. 685 orang.

Untuk memperluas pendidikan dasar, pada tahun 1892, terdapat peraturan pemerintah Belanda, berupa Surat Keputusan Raja Nomor 25 Tahun 1892 yang mengatur reorganisasi pendidikan dasar yaitu :1) sekolah dasar kelas satu untuk anak-anak, para pemuda dan orang-orang terhormat bumi putera, 2) sekolah dasar kelas dua untuk anak-anak pribumi pada umumnya dan 3) sekolah

dasar kelas satu dikembangkan untuk anak-anak Belanda dan kaum bangsawan dengan dibentuk HIS (*Holland Inlandsche School*).¹²

Pendirian sekolah-sekolah tersebut, mendapat sambutan yang tidak memuaskan dari kalangan masyarakat Indonesia pada masa itu. Ini ditandai dengan tingginya angka putus sekolah dan mutu pengajaran yang sangat rendah. Resistensi terhadap sekolah-sekolah ciptaan Belanda sangat kuat terjadi di masyarakat Indonesia, terutama sekali di Jawa, karena mereka menganggap sekolah-sekolah tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah kolonial Belanda untuk “membelandakan” anak-anak mereka.

Tantangan yang tidak kalah beratnya dan itu merangsang pesantren untuk memberikan respon datang dari kaum reformis Muslim. Pada abad kedua puluh, kaum reformis mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam modern sebagai jawaban terhadap tantangan kolonialisme dan kristenisasi. Pada masa itu terdapat dua kelembagaan pendidikan modern Islam di Indonesia. *Pertama*, mereka yang mendirikan sekolah-sekolah umum, tetapi diberi muatan Islam. Di antara pembaru Muslim yang melakukan upaya ini adalah Syekh Abdullah Ahmad dari Padang Panjang, yang memiliki Surau Jembatan Besi, namun ia lebih tertarik untuk mengelola sekolah-sekolah modern. Pada 23 Agustus 1915, ia mendirikan Sekolah Adabiyah dengan menggunakan empat orang guru berkebangsaan Belanda dan dua orang guru berkebangsaan Indonesia, yang memiliki ijazah mengajar di HIS. Pada tahun 1916, Pemerintah Belanda mengakui sekolah ini sebagai HIS pertama yang didirikan oleh organisasi Islam, yang kemudian pada tahun berikutnya mendapatkan subsidi penuh dari *gubernemen*.¹³

Kedua, adalah mereka yang mendirikan madrasah-madrasah modern, yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern yang diperkenalkan oleh Belanda. Termasuk dalam kategori ini adalah yang dilakukan oleh Zainuddin Labai al-Yunusi yang mendirikan Madrasah Diniyah dengan menerapkan model pendidikan modern, di antaranya

¹² Abdul Rahman Saleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 16.

¹³ Azyumardi Azra, “Surau di Tengah Krisis: Pesantren dalam Perspektif Masyarakat” dalam M. Dawam Rahardjo, (ed), *Pergulatan Dunia Pesantren : Membangun Dari Bawah* (Jakarta: P3M, 1985), hlm. 169.

digunakannya penjenjangan, kurikulum yang merupakan perpaduan pengetahuan agama Islam dan ilmu-ilmu umum, terutama ilmu Sejarah dan Ilmu Bumi.¹⁴

Demikian juga, organisasi Sumatera Tawalib mendirikan madrasah-madrasah modern di Padang Panjang, Parabek, Batu Sangkar, Maninjau, Bukit Tinggi dan lain-lain. Pada periode yang sama, madrasah-madrasah juga didirikan oleh Jamiat Khair, dan Al-Irsyad.¹⁵

Respon pesantren terhadap tantangan-tantangan di atas, adalah “menolak sambil mencontoh.”¹⁶ Mereka menolak asumsi-asumsi kaum reformis, namun pada saat yang bersamaan -kecuali pada batas-batas tertentu- mengikuti upaya-upaya modernisasi pendidikan yang dilakukan kaum reformis, untuk dapat mempertahankan keberadaannya. Oleh karenanya, pesantren melakukan sejumlah akomodasi dan penyesuaian yang mereka yakini mendukung keberlanjutan pendidikannya. Di samping itu mereka meyakini bahwa upaya tersebut memberikan dukungan kepada santri untuk mencapai keberhasilan dalam belajarnya.

Modernisasi pendidikan pesantren diarahkan kepada modernisasi sistem pendidikannya, yang menghasilkan pengembangan kurikulum pendidikan pesantren dengan memasukkan mata pelajaran-mata pelajaran umum, yang selanjutnya berimplikasi terhadap diversifikasi lembaga pendidikan pesantren, sistem penjenjangan, kepemimpinan dan manajemen pendidikan pesantren.

Pesantren yang pertama kali memberikan respon adalah Pesantren Manbaul Ulum di Surakarta. Pesantren ini didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono pada tahun 1906, yang menjadi perintis masuknya pendidikan umum di pesantren. Menurut laporan inspeksi pendidikan Belanda, pada tahun tersebut, Pesantren Manbaul Ulum telah memasukkan mata pelajaran membaca (dengan tulisan latin), aljabar dan berhitung dalam kurikulum pendidikannya.¹⁷

Langkah yang dilakukan Pesantren Manbaul Ulum Surakarta, juga dilakukan oleh Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, yang pada tahun 1916 mendirikan “Madrasah Diniyah” yang mengadopsi sistem pendidikan modern. Pengenalan sistem pendidikan madrasah di pesantren tersebut diprakarsai oleh

¹⁴ Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 157.

¹⁵ Azra, “Pesantren, hlm. xiv.

¹⁶ Steenbrink, *Pesantren*, hlm. 68.

¹⁷ Azra, “Pesantren, hlm. xv.

Kiai Ilyas—menantu Hadratus Syaikh K.H.M. Hasyim Asy'ari. Zamakhsyari Dhofier menyatakan bahwa mulai tahun 1919 pendidikan pesantren tidak hanya mengajarkan pendidikan agama Islam semata, tetapi juga mata pelajaran mata pelajaran non agama seperti pelajaran bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Bumi yang dilaksanakan di madrasah. Abu Bakar Aceh menyebutkan bahwa K.H A. Wahid Hasyim mempunyai peranan penting dalam pembaharuan pendidikan di Pesantren Tebuireng. Ia bersama Kiai Ilyas berkampanye membasmi paham yang mengharamkan belajar huruf latin dan pengetahuan umum.¹⁸

Versi lain menyatakan bahwa setelah tahun 1931, madrasah mengalami perubahan besar, yaitu dengan dimasukkannya pengetahuan umum.¹⁹ Di Pesantren Tebuireng, sebagaimana disebutkan oleh Abu Bakar Aceh, pada tahun 1935 mulai dibuka madrasah dengan sistem modern yang diberi nama dengan Madrasah Nidzâmiyah, yang merupakan hasil karya dari K.H.A. Wahid Hasyim dengan sistem dan daftar pelajaran yang belum pernah dikenal di dunia pesantren secara keseluruhan, dan belum ada orang yang berani menciptakannya sebagai salah satu bagian dari pendidikan pesantren. Di dalam madrasah tersebut, selain pelajaran pendidikan Agama Islam dan bahasa Arab, juga diajarkan pengetahuan umum yaitu Bahasa Belanda dan Bahasa Inggris. Ketiga pelajaran ini dianggap haram di kalangan pesantren pada masa itu.²⁰

Masukkannya mata pelajaran umum di Pesantren Tebuireng—sebagai pesantren yang tersohor di Jawa dan Madura--, menginspirasi pesantren-pesantren lainnya untuk melakukan langkah yang sama. Mulai saat itu hingga sekarang, banyak pesantren yang sebelumnya hanya menyelenggarakan pembelajaran kitab-kitab keislaman klasik, melaksanakan sistem pendidikan madrasah dan sekolah dengan mengikuti kurikulum pemerintah.²¹

Respon dunia pesantren terhadap tantangan modernisasi, secara monumental terlihat atas didirikannya Pondok Pesantren Modern Gontor pada tahun 1926 oleh tiga bersaudara Kiai Ahmad Sahal, Kiai Zainuddin Fanani dan Kiai Zarkasyi. Pesantren tersebut menawarkan sistem pendidikan modern, yang

¹⁸ Abu Bakar Aceh, *Sejarah Hidup K.H. A Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar* (Jakarta Dharma Bhakti, 1982), hlm. 117.

¹⁹ Djumhur I dan Danasaputra, *Sejarah Pendidikan* (Bandung: C.V. Ilmu 1979), hlm.159.

²⁰ Aceh, *Sejarah*, hlm. 153.

²¹ Steenbrink, *Pesantren*, hlm. 120.

pada awalnya hanya menyelenggarakan pendidikan dasar atau Ibtidaiyah. Kemudian pada tahun 1936, pesantren ini mendirikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Kedua jenjang pendidikan ini kemudian disatukan dan diberi nama *Kulliyatul Muallimin al Islamiyah* (KMI). Kurikulum di KMI ini terdiri dari pelajaran ilmu-ilmu agama Islam, pelajaran umum, dan bahasa asing (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris).

Di samping itu, sistem pendidikan di Pesantren Modern Gontor, sejak awal berdirinya telah mempergunakan penjenjangan. Pesantren modern ini juga telah menggunakan fasilitas dan peralatan belajar seperti meja kursi, papan tulis dan lain-lain. Pada sisi lain, kemodernan Pondok Pesantren Gontor ini juga terlihat pada orientasi pembelajarannya pada penguasaan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, yang pada masa itu belum mendapatkan penekanan pada pesantren lainnya. Pembelajaran di pesantren ini lebih menekankan pada aspek praktik berbahasa Arab dan Inggris di lingkungan kampusnya sebagai bahasa pergaulan sehari-hari.

Pada masa setelah kemerdekaan, pesantren mendapatkan tantangan yang tidak kalah baratnya, ketika terjadi ekspansi sekolah umum dan madrasah modern. Respon pesantren terhadap kedua jenis lembaga pendidikan tersebut adalah merivisi kurikulumnya dengan memasukkan semakin banyak mata pelajaran ke dalam sistem pendidikannya, dan membuka kelembagaan dan fasilitas-fasilitas pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum.²²

Pada masa inilah banyak pesantren yang selain tetap mempertahankan pendidikan tradisionalnya, juga mendirikan madrasah-madrasah formal yang bernaung di bawah Kementerian Agama. Ketika pesantren tersebut membuka madrasah-madrasah formal, mau tidak mau pembelajaran di madrasah tersebut harus menggunakan kurikulum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Modernisasi pendidikan pesantren pada aspek kurikulum juga ditandai dengan muncul dan berkembangnya beberapa pesantren, yang kurikulum pendidikannya mengarah kepada materi-materi keterampilan dan keahlian. Fenomena ini tidak hanya mengubah wajah dan substansi pendidikan pesantren, sebagai lembaga pendidikan yang mencetak tenaga-tenaga ahli agama,

²² Azra, "Pesantren, hlm. xviii.

tapi juga menampilkan sosok lembaga pendidikan yang adaptif dan antisipatif terhadap perkembangan dan perubahan zaman.

Pesantren dengan tipe di atas, di antaranya adalah Pondok Pesantren Nurul Haramain yang bernaung di bawah yayasan Nahdlatul Wathan (NW) Narmada. Pesantren Nurul Haramain ini yang didirikan pada tahun 1991 oleh TGKH. M. Djuwaini Muchtar. Salah satu usaha pesantren tersebut ialah mencetak alumni-alumni yang dapat menguasai berbagai bidang, seperti yang terlihat pada program-program pengembangan *skill* santri. Hal tersebut dapat terlihat dari program-program ekstrakurikuler yang ditawarkan lembaga kepada anak didik mereka. Pesantren ini berdiri atas prakarsa dari tokoh-tokoh masyarakat termasuk para alim ulama setempat. Pesantren ini dipimpin oleh seorang TGH. Hasanain Juaini Lc, MH. yang merupakan anak laki-laki yang paling besar dari pendiri pesantren.²³

Kurikulum pendidikan di pesantren itu sangat menekankan kepada aspek fungsional yang mengarah kepada relevansi kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan di masyarakat. Kurikulum pendidikan di pesantren ini dari tingkat Madrasah Itidaiyah sampai sekolah tingkat Madrasah Aliyah, merupakan satu paket pembelajaran dengan prosentase sebagai berikut; kelompok dasar (agama) sebesar 25%, kelompok pertanian 12, 6 %, kelompok teknik sebesar 13, 1%, kelompok sosial ekonomi 8,8%, kelompok ilmu pasti dan ilmu pengetahuan alam 10,6%. Sekitar 1/3 dari jam pelajaran diisi dengan kegiatan keterampilan, dan 2/3 terdiri dari praktik. Pembelajaran sedapat mungkin dilaksanakan dengan metode belajar sambil berproduksi, yang ditujukan di samping santri mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, juga untuk menumbuhkan jiwa kemandirian (*enterpreneurship*).

Dikenalnya sistem pendidikan madrasah formal di pesantren menimbulkan perubahan-perubahan, yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut: *pertama*, aspek tujuan pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren pada awalnya didirikan sebagai lembaga pendidikan dan dakwah. Ini terkait dengan penyebaran Islam di Lombok yang menggunakan pesantren sebagai sarana penyebaran agama Islam. Beberapa data historis menunjukkan bahwa para *Tuan Guru Haji (TGH)*-pemberian gelar oleh masyarakat bagi orang yang

²³ Observasi, tanggal 5-10 November 2019

berdakwah dan memiliki jamaah- menyebarkan Islam dengan mendirikan pesantren.

Ketika dikenal sistem pendidikan madrasah dan sekolah, maka tujuan pendidikan pesantren tidak hanya mencetak kader-kader Muslim yang *tafaqquh fi al-din* dan Muslim yang dapat melaksanakan ajaran Islam dengan baik, namun juga berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan (pembelajaran) dengan dilaksanakannya sistem pendidikan madrasah dan sekolah dalam bingkai tujuan pendidikan nasional.

Perubahan terhadap pendidikan pesantren dengan diselenggarakannya madrasah terus bergulir. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, pesantren mengalami perubahan-perubahan dalam sistem, kurikulum, materi, metode pembelajaran sebagai respon dari perubahan dan tantangan zaman sehingga pesantren dapat mempertahankan keberlangsungannya. Salah satu perubahan yang mencolok adalah dengan keluarnya SKB tiga menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/ tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No.36 tahun 1975 tentang peningkatan mutu madrasah. SKB ini memberikan posisi yang lebih strategis terhadap madrasah yaitu: 1) ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum, 2) lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang lebih atas dan 3) siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat. Namun demikian SKB ini mengakibatkan porsi pelajaran ilmu-ilmu agama semakin berkurang yaitu sekitar 30% sedangkan pelajaran ilmu-ilmu umum sekitar 70%.

Perubahan yang lebih mendasar terjadi sejak diberlakukannya Undang Undang Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989, ketika madrasah harus memberikan pelajaran umum sama dengan sekolah umum, yang berarti kurikulum madrasah 100% sama dengan kurikulum pendidikan umum. Untuk mempertahankan pesantren sebagai lembaga pendidikan pencetak ulama, banyak pesantren yang melaksanakan pendidikan madrasah sesuai dengan kurikulum pada sekolah-sekolah umum (seperti Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kesenian, olah raga dan keterampilan) pada pagi hari, sedangkan pada siang, sore dan malam hari tetap menyajikan kajian-kajian ilmu-ilmu agama Islam.

Perubahan lainnya yang terjadi di pesantren dengan penyelenggaraan madrasah sekolah umum di dalamnya adalah kurangnya porsi pengajian kitab-kitab keislaman klasik, karena dengan dilaksanakannya madrasah dan sekolah waktu belajar santri lebih banyak dialokasikan di madrasah dan sekolah. Hal ini mengakibatkan menurunnya kemampuan santri dalam memahami kitab-kitab tersebut.

D. Penutup

Modernisasi pendidikan pesantren merupakan jawaban pesantren terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pesantren telah melakukan perubahan-perubahan yang dalam skala terbatas untuk menjamin keberlangsungan dan ketahanan pendidikan yang diselenggarakannya. Perubahan-perubahan di atas menyentuh aspek-aspek kurikulum (materi pembelajaran), metode, dan sistem evaluasi.

Hal yang sebaiknya dilakukan adalah bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan yang secara *istiqamah* menjaga nilai-nilai dan ajaran Islam, tetap mempertahankan sistem pendidikan tradisional yang menekankan pada penguasaan kitab-kitab klasik, dan pada sisi lain tetap melakukan inovasi pendidikan yang dilaksanakan.

E. Daftar Pustaka

- Aceh, Abu Bakar. *Sejarah Hidup K.H. A Wabid Hasyim dan Karangan Tersiar*. Jakarta Dharma Bhakti, 1982.
- Asrohan, Hanun. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Azra, Azyumardi. “Pesantren : Kontinuitas dan Perubahan” dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina 1997.
- , “Surau di Tengah Krisi: Pesantren dalam Perspektif Masyarakat” dalam M. Dawam Rahardjo, (ed), *Pergulatan Dunia Pesantren : Membangun Dari Bawah*. Jakarta: P3M, 1985.
- Djumhur I dan Danasaputra, *Sejarah Pendidikan*. Bandung: C.V. Ilmu 1979.
- Husein, Syed Sajjad dan Syed Alio Ashraf, *Menyongsong Keruntuhan Pendidikan Islam*, ter. Rahamani Astuti. Bandung: Gema risalah Press, 1994.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1990.
- Madjid, Nurcholish. *Islam: Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina, 1992.

- Mas'ud, Abdurrahman. *Menggagas Pendidikan Islam Non Dikotomik, Humanisme Religius Sebagai Paradima Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Gema Media, 2002.
- Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Rahman, Fazlur. *Islam*, Ter. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1984.
- Saleh, Abdul Rahman. *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah Sekolah: Pendidikan dalam Kurun Waktu Modern*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurchlis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional* (Jakarta: Ciputat Press, 2002).